

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Dwiyanto, 2015. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Akhmad Khairuddin, 2010. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta & Syafaat Anugrah Pradana, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Press. Depok.
- Bagir Manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII. Yogyakarta.
- Bhenyamin Hoessain, 2009. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI*. Jakarta.
- Khisty, C. J., dan Lall, B. K. 2006. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Erlangga. Jakarta.
- Laica Marzuki, 2005. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. UNY Press. Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. UII Press. Yogyakarta.

Nur Basuki Winarno, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

-----, dkk, 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Ed.revisi-11, Rajawali Press. Jakarta.

Sadu Wastiono, dkk, 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Fokus Media. Bandung.

Sani Z., 2010. *Transportasi (Suatu Pengantar)*. Penerbit UI Press. Jakarta.

SF Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

SF Marbun dan Mahfud MD. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.

Sinta Uli, 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*. USU Press. Medan.

Tamin, O. Z., 2000, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Penerbit ITB. Bandung.

### **Internet**

A. M. Mulyadi, 2014, *Modul Pelatihan Perancangan Jalur dan Lajur Sepeda*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, hlm. 12.

Azhar M., "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", Notarius, Vol. 8, Nomor 2 Februari 2015, hlm. 274-286.

Excecutive Summary Penyusunan Rencana Induk Jalur Sepeda Kota Malang Tahun 2014

Hervian Handika Sugasta, dkk., "Analisis Efektivitas Jalur Khusus Sepeda pada Kawasan Perkotaan Pontianak (Studi Kasus Jalan Sutan Syahrir - Jalan Jendral Urip - Jalan K. H. W. Hasyim - Jalan Merdeka)", JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Vol. 4, Nomor 4 Februari 2017, hlm. 2.

<https://fajar.co.id/2020/11/03/abdi-asmara-pembangunan-jalur-khusus-sepeda-harus-digiatkan/> (berita *online*).

<https://www.tagar.id/pasepeda-di-makassar-tewas-terjatuh-saat-gowes> (berita *online*).

<https://makassarinsight.com/read/populasi-kendaraan-lampau-kapasitas-jalan-makassar> (berita *online*).

<https://metro.sindonews.com/read/361996/170/pesepeda-ditabrak-mobil-mercy-di-bundaran-hi-korban-diduga-sempat-terlindas-1615510985/> (berita *online*).

<https://ubahlaku.id/read/136705/jalur-sepeda-500-meter-dikerjakan/> (berita *online*).

<https://makassar.tribunnews.com/2021/06/22/perjuangkan-keselamatan-pesepeda-mcc-dan-danny-sepakat-ada-jalur-sepeda-khusus-dari-cpi-tembus-tsm/> (berita *online*).

<https://makassar.tribunnews.com/2021/06/08/danny-pomanto-canangkan-pembuatan-jalur-sepeda-pengamat-bisa-manfaatkan-trotoar> (berita *online*).

<https://sulsel.suara.com/read/2021/06/01/185438/jalur-sepeda-jalan-ap-pettarani-makassar-dikuasai-pkl/> (berita *online*).

<https://www.republika.co.id/berita/gkjtky423/bandung-miliki-tujuh-titik-jalur-sepeda-sepanjang-15-km/> (berita *online*).

<https://portalsepeda.com/goweser-ini-dia-jalur-sepeda-di-kota-bandung/> (berita *online*).

I Gusti Ayu Putu Sutaesmi, 2015, "*Perencanaan Jalur Sepeda Pada Kawasan Perguruan Tinggi di Kota Malang*", Skripsi, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, Malang.

M. Zaini dan Agus Tri Darmawanto, "*Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*", Jurnal Ilmu

Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Vol. 15, Nomor 2 November 2015, hlm. 26.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025

Robi, *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 16

Qadhriati Dg. Bau, dkk., "*Kinerja Manajemen Lalu Lintas Baru di Kawasan Losari Kota Makassar*", Jurnal Transportasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Vol. 20, Nomor 1 April 2020, hlm. 38.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

Peraturan Wali Kota Bandung No. 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.